



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS JAKARTA

Jln. M.T. Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630

Telp. 021-8090704 Fax. 021-8090912, 8090928

Laman: jakarta.kemenkumham.go.id, Pos-el: kanwildki@kemenkumham.go.id

Nomor : W.10-PR.04.05 - 20
Sifat : sangat segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Matrik Rencana Aksi atas
Perjanjian Kinerja TA 2025

21 Januari 2025

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
di -

Jakarta

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor SEK.11-PR.04.05-20 tanggal 15 Januari 2025 Tentang Pengisian Matrik Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja TA 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Matrik Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja TA 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.

Demikian matrik ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaanannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Romi Yudianto

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI.

MATRIK RENAKSI
TAHUN 2025

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	RENCANA AKSI		TIMELINE RENAKSI (TRIWULAN I/II/III/IV)
BAGIAN UMUM DAN TU							
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	Rp. 63,116,389,000,-	Layanan BMN Kantor Wilayah	Penatausahaan BMN	I,III
						Pengalihan dan Monitoring BMN	II
						Penyusunan Laporan BMN	IV
					Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Melakukan Peliputan	I,II,III,IV
						Melakukan Publikasi	I,II,III,IV
					Layanan Kerja Sama	Melakukan Fasilitasi Kerja Sama	I,II,III,IV
						Menyusun Laporan fasilitasi kerja sama	III,IV
					Layanan Protokol	Melakukan Koordinasi Keprotokoleran	I,II,III,IV
						Pelaksanaan Keprotokoleran	I,II,III,IV
					Layanan Umum	Administrasi dan Pengelolaan Pengadaan Barjas/UKPBJ	I,II,III,IV
						Pengelolaan Rumah Tangga Kantor Wilayah	I,II
						Pengelolaan Kesehatan Pegawai	I,III
					Layanan Perkantoran	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan	I,II,III,IV
						Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	I,II,III,IV
					Layanan Sarana Internal	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	I

					Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	I,II
				Prasarana Internal Kanwil	Pelaksanaan renovasi Rumah Susun (Gedung dan Bangunan)	I,II,III,IV
				Layanan Manajemen SDM	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	I,II,III,IV
					Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian	I,II,III,IV
				Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Melakukan penyusunan Renstra Kantor Wilayah	III,IV
					Melakukan penyusunan Anggaran Kantor Wilayah T+1	II,III,IV
					Melakukan penyusunan Anggaran Kantor Wilayah T+2	IV
					Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Penganggaran	I,II,III,IV
				Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kantor	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Kinerja	I,II,III,IV
					Pelaksanaan Evaluasi dan Rekomendasi Kinerja Program dan Kegiatan	
					Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kantor Wilayah	II, IV
				Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	Penyusunan SAKIP	I,II,IV
					Penyusunan Manajemen Risiko	I,II,III,IV
					Penyusunan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	I,II,III,IV
				Layanan Manajemen Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 Kantor Wilayah	II
					Penyusunan Laporan Keuangan Semester 2 Kantor Wilayah	IV

						Pengelolaan Perbendaharaan Kantor Wilayah	I, II, III, IV
						Menindaklanjuti Temuan BPK dan Inspektorat Jenderal	IV
					Layanan Reformasi Kinerja	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	I,II,III,IV
						Pembentukan Satker WBK/WBBM	I,II,III,IV
						Pembangunan Budaya Anti Korupsi dan Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi	I,II,III,IV
					Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pengelolaan Kearsipan	I,II,III,IV
						Pengawasan dan Pemusnahan Kearsipan	I,II,III,IV
DIVISI PEMBENTUKAN REGULASI							
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	Rp. 400.000.000,-	Rekomendasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	Persiapan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	I dan IV
						Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	I,II,III, IV
						Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah	I,II,III, IV
					Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Rancangan Produk Hukum Daerah	III
						Pelaporan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan rancangan produk hukum daerah	IV
	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	5 Orang		Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah	Persiapan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	I dan IV
						Pelaksanaan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	I,II,III
						Pelaporan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	IV

Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	Rp. 150.653.000,-	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum	I, II, dan IV
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen			Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum	I,II,III, IV
						Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	III dan IV
						Peningkatan Pemahaman Analisis dan Evaluasi	I, III dan IV
Keanggotaan JDIHN dan Wilayah	Keanggotaan JDIHN dan Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	Rp.4.570.115.000	Pengelolaan anggota JDIHN di Wilayah	Peningkatan dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Wilayah	I, II, III
						Promosi, Penerbitan dan Kerja Sama Jaringan	I, II, III
						Pengelolaan Perpustakaan Hukum	I,II,III, IV
						Peningkatan Kapasitas Pengelola Perpustakaan	I
					Layanan Penyuluhan Hukum di Daerah	Penyiapan bahan kegiatan Penyuluhan Hukum	II
						Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum	II, III
						Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Penyuluhan	I, IV
					Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah	Sosialisasi dan Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan	I
						Pelaksanaan Seleksi dan Penyampaian Rekomendasi	II
						Pelaporan Hasil Kegiatan PJA di Wilayah	III
					Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	Persiapan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum	I, II, III, IV
						Pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum	I, II, III, IV
				Pelaporan	IV		
				Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah	Inventarisasi Data Peta Permasalahan Hukum	I	
					Pelaporan Hasil Inventarisasi Data Permasalahan Hukum	IV	
		1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang	82%		Kegiatan bantuan hukum litigasi	Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa	I, II, III, IV
	Meningkatkan Layanan					Upaya Hukum Luar Biasa	I, II, III, IV
Bantuan Hukum di Wilayah		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%		Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	Penyebarluasan Informasi dan Penanganan Perkara di luar Pengadilan	I, II, III, IV

						Konseling	I, IV
	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%		Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok KADARKUM dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	I, II, III
						Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	I
					Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	I, II, III, IV
						Pelaporan	IV
	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Rp. 256.544.000,-	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	I, II, III, IV
						Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM	I, II, III, IV
						Monitoring dan Evanalusi Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	I, II, III, IV
						Kesekretariatan Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	I, II, III,
						Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	I
DIVISI PELAYANAN HUKUM							
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	Rp. 2.556.450.000,-	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Verifikasi Data Kewarganegaraan	I,II,III,IV
						Pelantikan PPNS	II,III,IV
						Pelantikan Notaris	I,II,III,IV
						Layanan AHU lainnya	I,II,III,IV
						Migrasi data layanan AHU	I,III
						Sosialisasi/ Diseminasi /FGD/ Rakor/ Seminar/Workshop/Pendalam an materi layanan AHU di wilayah	I,II,III
						Publikasi, Pameran dan Helpdesk	I,II,III,IV
						Koordinasi	I,II,III,IV
					Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	Pemantauan dan Evaluasi	II
						Laporan Pemantauan dan Evaluasi	IV
					Penanganan perkara pada kantor wilayah	Advokasi perkara terkait produk layanan AHU di wilayah	I,II,III,IV

	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%		Pengawasan kenotariatan oleh Majelis Pengawas di wilayah	Dukungan sekretariat dan pengawasan MPW	I,II,III,IV
						Dukungan sekretariat dan pengawasan MPD	I,II,III,IV
						Dukungan sekretariat dan pengawasan MKNW	I,II,III,IV
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Rp. 2.443.176.000.-	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	Pemantauan dan Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual di Wilayah	II,III,IV
						Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	IV
						Evaluasi dan Pelaporan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	IV
					Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	III
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1.Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%		Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persiapan Diseminasi dan Edukasi Kekayaan intelektual di Wilayah	I
						Pelaksanaan Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	I,II,III,IV
					Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Evaluasi dan Pelaporan Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	III,IV
		2.Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%		Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	I,II,III,IV
						Evaluasi dan Pelaporan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	III,IV



Kepala Kantor Wilayah



Diandatangani secara elektronik oleh :
Romi Yudianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>